

OPERASI BERSAMA BKC HASIL TEMBAKAU ILEGAL

Petugas Sita Rokok dan Tembakau Iris



Barang bukti yang disita petugas.

KR-Istimewa

TERKAIT PILUR DI SLEMAN

Suryo Ndadari Minta Kebijakan Politik Gubernur

SLEMAN (KR) - Paguyuban Lurah dan Pamong Suryo Ndadari meminta kepada Gubernur DIY selaku Raja Kraton Yogya untuk membuat kebijakan politik terkait pelaksanaan Pemilihan Lurah (Pilur) pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Harapannya 7 calon yang terdampak putusan MK tetap bisa mengikuti pilur karena semua tahapan sudah dilalui.

Penasihat Suryo Ndadari Sismantoro mengatakan, Yogyakarta ini merupakan daerah istimewa yang diatur dengan Undang-undang Keistimewaan No. 13 Tahun 2012. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Gubernur DIY selaku Raja membuat kebijakan politik.

“Kami berharap ada kebijakan politik dari Ngarso Dalem, soalnya Yogya daerah istimewa. Supaya para calon lurah yang terdampak putusan MK tetap bisa mengikuti pilur,” kata Sismantoro, Rabu (6/10).

Berdasarkan sejarah, lurah ini bagian

birokrasi dari Kraton Yogya yang ditugaskan di wilayah untuk mengurus masyarakat. Bahkan lurah dan pamong itu juga bagian dari abdi dalem. Untuk itu, sudah sepantasnya Gubernur DIY membuat kebijakan politik dalam pilur.

“Lurah itu memang ada benang merahnya dengan Kraton. Kalau di Bali saja bisa melaksanakan aturan sesuai dengan desa adat yang dasarnya asal usul. Kenapa Yogya tidak bisa melaksanakan itu?” tanyanya.

Alasan lain, lanjut Sismantoro, 7 calon lurah itu juga telah mengikuti semua tahapan. Bahkan para incumbent telah mengantongi izin dari Bupati Sleman yang menerangkan belum menjabat tiga kali dan izin mencalonkan kembali. “Artinya semua calon telah memenuhi persyaratan, termasuk 7 orang ini. Ibarat main sepakbola, ini sudah perpanjangan waktu tapi di tengah jalan dihentikan. Jelas ini tidak adil,” tegasnya. **(Sni)-f**

KH HABIB A SYAKUR PIMPIN MUI BANTUL

Masyarakat Diminta Waspada Terhadap PKI

BANTUL (KR) - MUI Bantul diminta ikut berperan dalam penanganan dan pencegahan penularan Covid-19 di wilayahnya. Selain itu mereka juga harus waspada terhadap munculnya kembali PKI, agar peristiwa G30S tidak terulang lagi.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan MUI DIY, KRT Drs HAM Kamaludiningrat, ketika mengukuhkan kepengurusan MUI Bantul periode 2021-2026 di Pendapa Pemkab Bantul Kompleks Manding, Rabu (6/10). Pengukuhan tersebut disaksikan Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih dan jajaran Forkompinda Bantul lainnya. “Kita berharap peristiwa G30S tidak akan terulang lagi,” tegasnya.

Sementara Bupati Bantul berharap MUI mampu menjadi wadah yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam dalam mewujudkan cita-cita bersama. Di antaranya dalam merajut kebersamaan atas

dasar ukhuwah Islamiyah, wathaniyah dan basyariyah dalam ikhtiar mewujudkan Bantul yang harmonis dan sejahtera, serta menjaga keutuhan NKRI.

Pengurus MUI Bantul periode 2021-2026 meliputi Dewan Pimpinan Harian, sebagai Ketua Umum Dr KH Habib A Syakur MA, dilengkapi 5 personel ketua yakni Drs H Saebani MA MPd, Drs H Syahro Hadi Putro, Drs KH Damanhuri dan Drs H Syahroini Djamil.

Sekretaris Umum Drs H Imron Rosyit, dibantu Kasi Bimas Islam Kemenag Bantul Trubus Trimulyadi SAg. Bendahara Umum Drs H Bambang Inanta MA dibantu H Bahrudin SPd dan Drs Muhyidin AG.

Dilengkapi 6 Komisi, meliputi Komisi Fatwa, Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Umat Beragama, Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam, Pendidikan dan Seni Budaya Islam, Pengembangan Kajian dan Penelitian, serta Komisi Pemberdayaan Perempuan Remaja dan Keluarga. **(Jdm)-f**

Medsos Sambungan hal 1

Senin sore hingga Selasa pagi (4-5/10) hal itu terjadi. Tiga medsos mendarak mati suri. Secara bersamaan, jaringan WhatsApp, Facebook dan Instagram, tidak dapat diakses penggunaannya untuk berkomunikasi daring. Jalur komunikasi daring menjadi mati suri. Pengguna dan pemilik akun WhatsApp paling merasakan dampaknya. Mereka menjadi kempungan karena tidak dapat menjalankan pekerjaannya.

Pada era pandemi ini, bekerja dari rumah (BDR) menjadi andalan mereka untuk mendapatkan gaji dan penghasilan. Fasilitas BDR ditumpukan pada kelancaran jaringan internet dan medsos. Kedua produk teknologi komunikasi digital itu diposisikan sebagai kantor virtual. Menjadi tempat melakukan rapat koordinasi atas tugas dan penugasan. Pelaku BDR mengandalkan WhatsApp sebagai piranti komunikasi daring paling praktis.

Ketika medsos mati suri, semua pemilik akun medsos menjadi korban bencana komunikasi daring. Realitas sosial ini mencatat fakta sejarah, ternyata warganet sangat tergantung pada jaringan internet dan medsos. Kedua produk komunikasi digital ini bagaikan nyawa kedua yang bersemayam di dalam tubuh manusia. Tanpa jaringan internet dan medsos, manusia berbaju warganet menderita penyakit lumpuh layu. Ia masih hidup, tapi *nglkr*.

Terhadap bencana komunikasi daring, seharusnya warganet menyadari keberadaan dirinya sebagai manusia yang sepenuh jiwa raganya hidup di jagat raya. Manusia yang menyebut dirinya warganet sejatinya juga manusia yang hidup di bumi pertiwi. Jaringan internet dan medsos harus disikapi sebagai piranti yang didedikasikan untuk memudahkan menjalankan hidup dan kehidupan di jagat raya ini.

Bahwa benar adanya ketika kedua produk teknologi itu menyebabkan segala sesuatu yang didekatinya seolah-olah hidup, bernyawa, menyenangkan dan membahagiakan. Karena bersifat seolah-olah, maka keberadaannya sama sebagian dengan fatamorgana dan garis cakrawala. Semuanya bersifat virtual

dan semu! Karena itulah keutamaan dan kesejatan diri manusia itu tidak dapat ditakar dari kesemuan banyaknya *follower*, *like*, *share* dan komentar yang diperoleh dari postingan mereka di medsos.

Sejatinya, bentuk dan ukuran keutamaan diri manusia Indonesia terpampang di dalam lima sila Pancasila. Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia. Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Khidmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Mati surinya medsos beberapa hari lalu, seharusnya menjadi pijakan baru untuk melakukan perubahan menyeluruh. Fenomena bencana komunikasi daring itu harus menjadikan momentum menumbuhkan kesadaran pentingnya literasi digital.

Bagaimana caranya? Yakni dengan senantiasa mengedepankan budaya komunikasi dialogis. Siapa wajib mengedepankan budaya komunikasi dialogis? Tentu saja mereka yang disebut pejabat publik, pemimpin bangsa, anggota dewan serta tokoh masyarakat. Merekalah sang komunikator. Memiliki tugas negara menjalankan proses komunikasi dialogis kepada warga masyarakat dan warganet.

Melalui budaya komunikasi dialogis yang mengedepankan unsur komunikasi empatik dalam kemasan komunikasi cinta. Mereka wajib mengantisipasi berbagai kasus yang membikin gaduh kehidupan masyarakat.

Mereka harus mampu membuat strategi dan budaya komunikasi dialogis yang baik. Lewat bangunan komunikasi empatik dalam balutan komunikasi cinta, mereka seyogianya dapat mencari solusi atas permasalahan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang meruyak di kalangan masyarakat dengan tepat. Upaya pemecahan masalah wajib mengutamakan rasa kemanusiaan yang keadilan di antara para pihak. *(Penulis adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta)-d*

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Satpol PP, Disperindang bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta melakukan Operasi Bersama Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau Ilegal, Rabu (6/10).

Operasi ini menyasar Pasar Stan, toko kelontong, tembakau dan vapour di wilayah Kapanewon Depok serta Kapanewon Kalasan.

Pemeriksa Bea dan Cukai Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Yusron Asrofi menjelaskan, sasaran dari kegiatan operasi bersama adalah hasil tembakau ilegal seperti rokok (sigaret), cerutu, rokok daun, HTPL, dan tembakau iris dengan sasaran tempat operasi distributor dan pengecer. Indikator BKC hasil tembakau ilegal antara lain tanpa pita cukai, pita cukai bekas, pita cukai palsu, salah peruntukan dan personalisasi (tidak

sesuai kode pita cukai). “Operasi bersama BKC ilegal ini dalam rangka pengendalian peredaran BKC hasil tembakau ilegal di Kabupaten Sleman,” jelasnya.

Dalam operasi ini petugas menyita 20 bungkus rokok dan 39 tembakau iris yang dibungkus kemasan 50 gram dan tidak dilekati pita cukai dari dua toko kelontong di wilayah Kapanewon Kalasan. Pemilik toko diberikan edukasi oleh petugas tentang cukai tembakau. “Pemilik toko hanya dititipi rokok tanpa cukai tersebut oleh sales, dan kami menyitanya kemudian memberikan edukasi untuk tidak menjual

rokok tanpa cukai,” tambah Yusron.

Sementara Kasubbag Perekonomian Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sleman Citra Makkia Azmiati menjelaskan, operasi bersama BKC hasil tembakau ilegal ini dimaksudkan untuk melakukan pengendalian atas barang kena cukai hasil tembakau ilegal. “BKC hasil tembakau yang beredar di Kabupaten Sleman perlu dilakukan pengawasan untuk memastikan BKC hasil tembakau yang beredar merupakan barang kena cukai yang legal,” ujarnya.

Citra menambahkan, tujuan dari kegiatan operasi bersama BKC hasil tembakau ilegal adalah untuk melakukan pengawasan dan mendukung penegakan hukum atas barang kena cukai hasil tembakau ilegal oleh Bea Cukai. Selain itu juga untuk memberikan pemahaman terkait ketentuan di bidang cukai hasil tembakau kepada masyarakat. **(Has)-f**

Sendangsari Berusaha Menjadi Pusat Brambang

BANTUL (KR) - Pemerintah Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Bantul tengah merintis demplot budidaya bawang merah di Karangjati Benyo. Dari program tersebut diharapkan Sendangsari menjadi pusat komoditas produk hortikultura itu. Sementara dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pajangan juga bakal melakukan pendampingan.

Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo, di sela melakukan penanaman perdana bawang merah, Rabu (6/10), mengatakan sebelumnya Kalurahan Sendangsari punya andil sebagai wilayah pengembangan bawang merah. Menurut Joko, Kalurah-

an Sendangsari pada dekade 1980-an pernah mengembangkan komoditas tersebut. Tahun ini Gapoktan Sendangsari melakukan uji coba demplot seluas 1.700 meter persegi. Hal tersebut sebagai terobosan sekaligus inovasi dan pengembangan sektor pertanian di Bantul.

“Kita semua tentu berharap demplot yang sudah dirintis ini berhasil. Harapannya bisa mengembalikan kejayaan tahun 1980-an saat Sendangsari berhasil mengembangkan bawang merah,” ujarnya. Acara tersebut juga dihadiri Penewu Pajangan Anjar Arintaka, Lurah Sendangsari Durori SPd MPd. Kepala Bidang Tanam-



KR-Sukro Riyadi

Joko Purnomo memulai tanam bawang merah di Sendangsari Pajangan Bantul.

an Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Bantul, Ir Imawan Eko Handriyanto MP, mengatakan jika dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pajangan

bakal melakukan pendampingan. Karena demplot ini dirintis diluar musim atau off season. Sehingga yang mesti diwaspadai ialah curah hujan tinggi sehingga berpotensi munculnya hama. **(Roy)-f**

GANDUNG SERAHKAN BANTUAN CSR PLN RP 100 JUTA

Bapeten Urai Kontribusi Nuklir bagi Kehidupan Manusia

BANTUL (KR) - Diseminasi penggunaan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia dilakukan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) bersama anggota Komisi VII DPR RI, Drs HM Gandung Pardiman MM digelar di Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bangsalipuro Bantul, Selasa (5/10). Program tersebut diikuti 50 warga dengan protokol kesehatan ekstra ketat.

Pada kesempatan tersebut Gandung menyerahkan bantuan CSR dari PLN total Rp100 juta untuk rumah pilah sampah bagi dusun Siten dan bantuan helm bagi peserta. Dalam kegiatan tersebut disampaikan fungsi dan manfaat tenaga nuklir bagi kehidupan manusia. Hadir dalam acara itu Kapolsek Bangsalipuro Polres Bantul Poldi DIY, AKP Khabibulloh SPd MM, Penewu Bangsalipuro Roy Robert Edison Bonai AP MM, Lurah Sumbermulyo Dra Ani Widayani.

Gandung Pardiman mengatakan, jika seni seorang pemimpin adalah kemampuan dalam mengelola orang banyak. Jika mampu menancapkan sebuah rasa 'katresnan' kepada orang banyak figur sebagai pemimpin sudah berhasil dan sukses. “Oleh karena itu ke depannya dalam memilih pemimpin harus benar-benar yang punya rasa peduli kepada rakyatnya,” kata Gandung yang juga Ketua DPD Partai Golkar DIY.



KR-Sukro Riyadi.

Drs HM Gandung Pardiman MM memberi sambutan.

DIY terdapat 101 instansi memanfaatkan nuklir, 14 di antaranya berada di Bantul. Sebagai contoh Puskesmas Bangsalipuro juga memanfaatkan nuklir untuk keperluan rontgen. “Artinya bahwa tidak semua nuklir itu sesuatu yang menakutkan, karena sangat bermanfaat bagi manusia,” jelasnya. Selain itu salah satu fungsi nuklir bisa untuk mamandulkan alat dan nyamuk agar tidak berkembang biak.

Menurut Abdul Qohhar berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1977 Tentang Pengawasan terhadap Pemanfaatan Tenaga Nuklir dilaksanakan badan pengawas. Badan tenaga nuklir nasional kini tergabung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Tugasnya melaksanakan pengembangan atau penelitian misalnya soal bibit unggul. Kemudian badan pengawas tenaga nuklir juga ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pemanfaatannya di Indonesia.

“Tujuannya memastikan

pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia terjamin dari aspek keselamatan dan aspek keamanannya,” katanya.

Terkait Bapeten di Indonesia jumlahnya hanya satu, sementara instansi yang mesti dilakukan pengawasan jumlahnya mencapai 6 ribu. Sebaliknya sumber daya manusia di Bapeten itu kurang dari 500 orang. “Sehingga kami selaku badan pengawas hadir untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir sesuai ketentuan,” jelasnya.

Penewu Bangsalipuro Roy Robert Edison Bonai AP MM mengatakan, sangat banyak kontribusi sudah diberikan Gandung Pardiman kepada masyarakat Sumbermulyo. “Saya mewakili masyarakat Sumbermulyo khususnya dan Bangsalipuro umumnya terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Gandung atas bantuan kepada masyarakat kami apalagi di saat pandemi seperti ini,” ujar Roy. **(Roy)-f**



KR-Sukro Riyadi.

Abdul Qohhar menjelaskan manfaat nuklir.



KR-Sukro Riyadi.

Drs HM Gandung Pardiman MM menyerahkan CSR dari PLN kepada warga Siten.



KR-Sukro Riyadi.

Drs HM Gandung Pardiman MM menyerahkan helm kepada peserta sosialisasi.